kan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 19

- (1) Komisaris terdiri atas:
 - a. Komisaris Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Direksi menyiapkan Rencana Bisnis Bank PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

- (1) Komisaris dan Direksi Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan yang disusun Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan yang disusun oleh direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

Tahun buku PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi (joint operation); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan administrasi; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) beralih kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- b. periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatannya dimaksud.
- c. seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaian sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (.../...)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
BANTUL

I. UMUM

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dibentuk pertama kali dengan nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, diubah nomenklaturnya dengan nama Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Kabupaten Bantul, dan diubah bentuk badan hukumnya terakhir dengan menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul, diperlukan peran badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha perbankan. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sebagai satu-satunya badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha perbankan, perlu dilakukan optimalisasi agar benar-benar mampu menjadi penggerak perekonomian daerah serta mampu berkompetisi dalam memberikan layanan perbankan di Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul harus dilakukan reorganisasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha perbankan.

Berdasarkan ketentuan 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul harus segera disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi

cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki Bank Bantul sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham diatas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Cadangan Umum" adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Cadangan Tujuan" adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tantiem" adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada komisaris dan direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jasa produksi" adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dana kesejahteraan" adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, social serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL/NOMOR ...

Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini melalui :
email : hukum@bantulkab.go.id
dengan batasan waktu 5 hari sejak Publikasi Rancangan Peraturan Daerah ini.